



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jl. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP : 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10010

Nomor : B- 17 /Bua.3/KU.01/08/2016

1 Agustus 2016

Lamp : Tiga lembar

Hal : Permintaan Pengisian Capaian Kinerja TA. 2016 pada Aplikasi SMART

- Yth.
1. Sekretaris Kepaniteraan
 2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
 3. Para Sekretaris Badan
 4. Para Kepala Biro di Lingkungan Badan Urusan Administrasi
 5. Para Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tingkat Banding
 6. Para Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Kelas I A Khusus
 7. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama

Pada 4 (empat) lingkungan Peradilan seluruh Indonesia

Di tempat

Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor : S-1862/AG/2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang permintaan Pengisian Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2016, maka diharapkan kepada Saudara untuk melakukan pengisian data/updata data realisasi anggaran dan realisasi volume keluaran pada aplikasi SMART (**monev.anggaran.depkeu.go.id**).

Data tersebut akan dipergunakan sebagai bahan masukan penyusunan/penajaman kebijakan Tahun Anggaran 2017 dan sebagai salah satu bahan penilaian evaluasi kinerja Kementerian/Lembaga.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

A.n Kepala Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI
Kepala Biro Keuangan
Badan Urusan Administrasi MA - RI



SUTISNA
NIP. 19581127 198403 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 12, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 2435 JKP 10024
TELEPON (021) 3457122; FAKSIMILE (021) 3505118; SITUS www.anggaran.depkeu.go.id

Nomor : S-1862/AG/2016 28 Juli 2016
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Pengisian Capaian Kinerja TA 2016 pada Aplikasi SMART

Yth. Pejabat Eselon I Selaku Penanggungjawab Program
pada Kementerian Negara/Lembaga
(daftar terlampir)

Sehubungan dengan hal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 8 ayat (8) dan (9) PMK Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L, diatur bahwa pengumpulan data realisasi anggaran dan realisasi volume keluaran dilakukan setiap bulan sesuai dengan realisasi yang telah dicapai yang dapat digunakan sebagai bahan monitoring atas pelaksanaan RKA-K/L pada tahun berjalan.
2. Jumlah Satker yang telah melakukan pengisian data/update data realisasi anggaran dan realisasi volume keluaran pada aplikasi SMART sampai dengan akhir bulan Juli 2016 adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II**.
3. Menindaklanjuti hal tersebut, diharapkan kepada Saudara selaku Penanggungjawab Program, agar menginstruksikan Satker-Satker dalam lingkup tugas Saudara untuk melakukan pengisian data/update data realisasi anggaran dan realisasi volume keluaran pada aplikasi SMART (monev.anggaran.depkeu.go.id).
4. Data dimaksud pada angka 3. akan digunakan sebagai bahan masukan penyusunan/penajaman kebijakan TA 2017 dan sebagai salah satu bahan penilaian evaluasi kinerja Kementerian/Lembaga.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum,
Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara



Dwi Pudjiastuti Handayani
NIP. 196601011991032001

Tembusan:
Direktur Jenderal Anggaran

Lampiran I Surat Direktur Jenderal Anggaran

Nomor: S-1062 /AG/2016

Tanggal 28 Juli 2016

1. Mahkamah Agung RI;
2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Luar Negeri;
5. Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional Indonesia (TNI);
6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9. Dewan Ketahanan Nasional (WANTANNAS);
10. Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS);
11. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM);
12. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
13. Badan Intelijen Negara (BIN);
14. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
15. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
16. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP);
17. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG);
18. Komisi Pemilihan Umum (KPU);
19. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU);
20. Lembaga Administrasi Negara (LAN);
21. Badan Kepegawaian Negara (BKN);
22. Badan Narkotika Nasional;
23. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
24. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI);
25. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI);
26. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
27. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).

Lampiran II Surat Direktur Jenderal Anggaran
 Nomor: S-1862/JAG/2016
 Tanggal 28 Juli 2016

No.	Kode K/L	Nama K/L	Jumlah Satker	Jumlah Satker dengan Pagu Mo	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	Sep	Oktober	Nov	Dik	Partisipasi Serah (%)	Partisipasi Serah (%)	Rincian
1	005	LAHKAH AGUNG	1.657	0	1.410	1.417	1.432	1.370	1.396	1.362	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371	1.472	88.84	
2	006	KEJURUSAN REPUBLIK INDONESIA	521	0	482	399	397	377	347	291	51	0	0	0	0	0	405	77.74	
3	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	834	1	635	595	636	343	161	172	12	0	0	0	0	0	643	77.19	
4	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	144	0	137	136	137	127	122	106	0	0	0	0	0	0	138	95.83	
5	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	457	3	244	246	244	203	181	162	39	0	0	0	0	0	254	55.95	
6	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	1.113	0	874	874	874	874	874	874	874	874	874	874	874	874	698	62.71	
7	014	KEMENTERIAN KORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	
8	015	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	
9	016	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	
10	017	BADAN INTELEKSI NEGARA	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	
11	018	LEMBAGA SANDI NEGARA	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	
12	019	DEWAN KETIDAKPACAKAN NASIONAL	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	
13	020	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	61	0	57	57	57	53	54	52	8	0	0	0	0	0	57	93.44	
14	021	KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1.254	0	1.099	1.099	1.099	1.037	98	818	200	0	0	0	0	0	1.103	87.96	
15	022	LEMBAGA KETIDAKPACAKAN NASIONAL	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	
16	023	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	175	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1.14	
17	024	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	
18	025	KOMISI PEMILIHAN UMUM	549	0	342	376	348	339	324	305	44	0	0	0	0	0	388	70.67	
19	026	PUSAT PELATIHAN DAN ANALISIS TRANSFORMASI KEUANGAN	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	
20	027	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	8	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100.00	
21	028	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	15	0	14	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12	12	14	93.33	
22	029	KOMISI PEMERINTAHAN KORUPSI	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	
23	030	BADAN NASIONAL PENGELUARAN PERGASASAN	27	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	11.11	
24	031	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
25	032	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	35	0	35	35	35	35	34	30	1	0	0	0	0	0	35	100.00	
26	033	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	70	0	63	63	62	52	52	21	3	0	0	0	0	0	63	90.00	
27	034	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	30	0	22	23	22	2	18	11	0	0	0	0	0	0	24	80.00	
28	035	BADAN KEAMATAN LAUT	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	
Total			8.987	4	5.206	5.185	5.150	4.999	4.412	3.318	485	0	0	0	0	0	5.317	80.96	